



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Minggu

Tanggal: 08 Januari 2017

Halaman: 2

Kocok Ulang Pejabat Pemkot Ganggu Sidang Dewan

Tujuh Jabatan Lowong, Sekwan Menyesuaikan

JOGJA - Pasca pengukuhan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai PP Nomor 18/2016 tidak hanya meninggalkan tujuh jabatan eselon II yang lowong. Kocok ulang jabatan di Pemkot Jogja itu juga membuat jadwal

persidangan di dewan terganggu. Sekretariat DPRD Kota perlu menyesuaikan dengan hasil perombakan OPD baru.

Ketua DPRD Kota Jogja Sujarno mengatakan, pada minggu pertama Januari 2017 ini belum bisa langsung bekerja karena masih ada penyesuaian di sekwan. Di sekwan yang sebelumnya terdapat empat bagian usai penerapan PP No 18/2016 tersebut.

"Sekwan mengatakan perlu penyesuaian dengan organisasi baru," ujar Koko kemarin (7/1). Diungkapkan, sebelumnya ia sudah menyusun jadwal kerja bersama di Badan Msuyawarah (Bamus). Tapi karena ada penyesuaian di sekwan, jadwal itu belum bisa langsung dikerjakan.

Pihaknya menargetkan paling tidak minggu depan jadwal persidangan di DPRD Kota sudah normal kembali. Koko berharap

tidak perlu menunggu sampai dua minggu waktu penyesuaian organisasi baru.

"Sebetulnya tata kalanya sudah kami buat, tapi karena sekwan perlu penyesuaian, ya sudah jangan berpatokan hasil Bamus itu dulu," jelasnya.

Politikus PDIP ini mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah peninggalan 2016 yang harus segera diselesaikan. Meski tidak mau menyebut sebagai prioritas,

Koko mengatakan Raperda luncuran tahun sebelumnya, akan diselesaikan tahun ini.

Ia menyebut seperti raperda kawasan tanpa asap rokok, raperda pemenuhan hak disabilitas, raperda menara telekomunikasi dan keputusan dewan terkait pokok-pokok pikiran, bisa langsung dikerjakan tahun ini. "Seperti raperda KTR katanya tinggal sekali lagi pertemuan, raperda disabilitas juga sudah

ada surat ke pimwan, harapannya bisa langsung diselesaikan," ungkapnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Pansus Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok Dwi Budi Utomo mengaku, pihaknya hanya membutuhkan satu kali pembahasan agar dapat ditetapkan. Namun dalam sepekan terakhir tahun ini dewan disibukkan dengan finalisasi APBD 2017 yang menjadi prioritas. (pra/laz/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BKPP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005